

**KELEMBAGAAN PERTANIAN  
BERBASIS KEARIFAN LOKAL UNTUK Mendukung  
PENGEMBANGAN AGRIBISNIS PANGAN  
(Agriculture Institutions Based on The Local Wisdom  
to Support Food Agribusiness Development)**

**E. Prasetyo dan T. Ekowati**

Fakultas Peternakan dan Pertanian, Universitas Diponegoro.

**ABSTRAK**

Ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengembangan kelembagaan pertanian dan sistem agribisnis mempunyai peran besar dalam menunjang terwujudnya ketahanan pangan yang kokoh. Kelembagaan pertanian dalam pengembangannya perlu diarahkan menjadi kelembagaan ekonomi dengan tujuan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, serta meningkatkan posisi dan kekuatan tawar petani. Melalui pembinaan kelembagaan ekonomi, petani sebagai pelaku utama akan diorganisir dan ditingkatkan kemampuannya melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan (*entrepreneur*). Kelembagaan ekonomi petani idealnya memenuhi prinsip spesifik lokal, prinsip pemberdayaan, dan prinsip kemandirian. Pengembangan agribisnis pangan harus senantiasa memperhatikan masing-masing subsistem di dalamnya, serta memperhatikan karakteristik usaha pada tingkat petani, termasuk kearifan lokal. Di samping itu juga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan peranan dan tugas organisasi kelembagaan pertanian, kemanfaatan peraturan dan regulasi pemerintah yang pro petani, serta meningkatkan pemahaman petani melalui pelatihan (*on job training*).

Kata kunci: kelembagaan pertanian, kearifan lokal, agribisnis pangan.

**PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 7/1996 tentang pangan menyatakan, ketahanan pangan adalah terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Pengertian ketahanan pangan lebih luas dari sekedar kemandirian pangan (Saragih, 2010). Kemandirian pangan telah ditegaskan dalam peraturan perundangan, misal PP No. 68/2002 tentang ketahanan pangan, dinyatakan, (i) pemenuhan kebutuhan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri; (ii) pengelolaan sistem cadangan pangan ditentukan sendiri sesuai kepentingan nasional, sehingga tidak tunduk pada tekanan negara lain. Ketahanan pangan mencakup tiga aspek penting sebagai indikator keberhasilan, yaitu: (i) ketersediaan pangan, yang berarti pangan tersedia cukup untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik jumlah maupun mutunya, serta aman; (ii) distribusi, pasokan pangan dapat menjangkau keseluruhan wilayah, sehingga harga stabil dan

terjangkau oleh seluruh rumah tangga; (iii) konsumsi, yaitu setiap rumah tangga dapat mengakses pangan yang cukup dan mampu mengelola konsumsinya sesuai kaidah gizi dan kesehatan, serta preferensinya.

Tantangan dan permasalahan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan sangatlah banyak. Permasalahan pada aspek ketersediaan, meliputi: (i) laju peningkatan kebutuhan pangan yang lebih besar dari pada laju peningkatan produksinya; (ii) terbatasnya infrastruktur irigasi; (iii) meningkatnya jumlah petani kecil dengan luas lahan garapan kurang dari 0,25 ha; (iv) terbatasnya permodalan usaha; (v) lambatnya penerapan teknologi budidaya; (vi) banyaknya pemotongan ternak betina produktif; (vii) gangguan hama penyakit tanaman maupun penyakit ternak; dan (viii) rendahnya produktivitas pangan domestik. Permasalahan pada aspek distribusi, meliputi: (i) terbatasnya sarana dan prasarana perhubungan untuk menjangkau semua wilayah, utamanya wilayah-wilayah terpencil; (ii) terbatasnya sarana kelembagaan pasar; (iii) banyaknya pungutan

resmi maupun pungutan tidak resmi; (iv) tingginya biaya transportasi. Permasalahan pada aspek konsumsi meliputi; (i) tingginya jumlah penduduk miskin dan pengangguran dengan kemampuan akses pangan rendah; (ii) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap diversifikasi pangan dan gizi; (iii) masih dominannya konsumsi energi bersumber karbohidrat yang berasal dari beras; (iv) rendahnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan pangan.

Pelaku utama yang berperan dalam pengembangan sistem ketahanan pangan adalah petani sebagai produsen, pengolah, dan pedagang yang sebagian besar adalah pengusaha kecil. Menurut Suryana (2003), pemberdayaan kelompok pengusaha kecil sangatlah diperlukan, agar mereka dapat mandiri dan mampu mengembangkan agribisnis pangannya secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, maka kelembagaan pertanian dan sistem agribisnis mempunyai peranan yang besar dalam menunjang terwujudnya ketahanan pangan yang kokoh. Melalui penerapan agribisnis serta upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi dan keseimbangan gizi yang mempertimbangkan budaya dan kelembagaan lokal, maka secara langsung juga membangun ketahanan pangan yang kokoh.

Kelembagaan pertanian diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk mengeliminir permasalahan-permasalahan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Peran kelembagaan pertanian pada tingkat nasional sangat menonjol dalam program dan proyek intensifikasi dan peningkatan produksi pangan. Menurut Sumardjo (2000), kelembagaan pertanian tidak dapat dilepaskan dari upaya pemenuhan kebutuhan petani dan pengembangan fungsi kontrol kelembagaan penunjang sistem agribisnis. Posisi dan fungsi kelembagaan petani dalam kehidupan komunitas petani, merupakan bagian pranata sosial yang memfasilitasi interaksi sosial dalam suatu komunitas. Kelembagaan petani memiliki titik strategis (*entry point*) dalam menggerakkan sistem agribisnis, utamanya di perdesaan.

## **KETAHANAN PANGAN DAN KEBERHASILAN PEMBANGUNAN**

Akses setiap individu terhadap pangan yang cukup merupakan hak asasi manusia yang berlaku secara universal. Suatu negara sampai sejauh mana dapat menghormati hak asasi

warganya, dapat diukur dari tingkat ketahanan pangan yang dicapainya. Ketahanan pangan dapat dijadikan salah satu indikator penting bagi keberhasilan pembangunan nasional, di samping indikator pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Ketahanan pangan yang tangguh pada suatu negara, tidak akan mudah goyah apabila terjadi penurunan produksi pangan maupun gejolak ekonomi (Saragih, 2010).

Ketersediaan pangan yang cukup tidak menjamin terjadinya ketahanan pangan, dan bila ketersediaan pangan per kapita yang menjadi acuan ketahanan pangan, maka Indonesia akan dengan mudah untuk mencapainya. Ketahanan pangan tidak identik dengan ketersediaan pangan. Pada banyak negara miskin menunjukkan, insiden kelaparan dan kekurangan makan bukan disebabkan oleh kurangnya ketersediaan pangan pada tingkat nasional, tetapi cenderung disebabkan oleh kegagalan masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pangan, atau bahkan mungkin kegagalan pemerintah dalam mendistribusikan pangan sampai pada tingkat masyarakat. Pendekatan ketersediaan pangan secara implisit mengasumsikan aksesibilitas setiap individu atau rumah tangga terhadap pangan yang tersedia tidak mengalami hambatan. Hal ini secara realitas tidak demikian dengan yang terjadi di Indonesia.

Pendekatan ketersediaan pangan di Indonesia tercermin dari berbagai kebijakan yang bertujuan memaksimalkan produksi pangan, utamanya beras. Berbagai ragam kebijakan pertanian, seperti misalnya kebijakan harga output maupun kebijakan harga input, kebijakan penyediaan sarana dan prasarana, kebijakan dan pengembangan pangan sebagian terlihat diarahkan untuk peningkatan produksi padi. Ketersediaan pangan erat kaitannya dengan ketahanan pangan, sehingga tercapainya swasembada pangan (utamanya beras) merupakan satu hal yang sangat diharapkan. Apabila swasembada pada tingkat nasional telah dapat dicapai, maka langkah berikutnya adalah menjamin ketersediaan pangan pada tingkat regional dan selanjutnya diatur distribusinya oleh pemerintah (misal melalui Perum Bulog). Agar setiap individu atau rumah tangga dapat mempunyai akses terhadap pangan, pemerintah mengendalikan harga pada tingkat konsumen. Kasus mahalnya harga kedele sebagai bahan baku tahu dan tempe pada akhir-akhir ini, mencerminkan bahwa peran lembaga pertanian (utamanya koperasi) tidak berfungsi lagi.

## KELEMBAGAAN PETANI

Peran kelembagaan pertanian dalam membangun dan mengembangkan sektor pertanian berdasarkan pengalaman masa lalu terlihat nyata pada kegiatan pertanian tanaman pangan. Kegiatan pembangunan pertanian pada masa lalu dituangkan dalam bentuk program dan proyek dengan membangun kelembagaan koersif, seperti Padi Sentra, DEMAS, BIMAS, Bimas Gotong Royong, Badan Usaha Unit Desa (BUUD), Koperasi Unit Desa (KUD), Intensifikasi Khusus (Insus), Supra Insus dan lain-lain (Nasrul, 2012). Menurut Prabowo (2000), secara sistematis upaya peningkatan produksi pangan baru terjadi setelah ada program BIMAS yang didahului oleh program DEMAS. DEMAS lebih berorientasi pada penerapan teknologi baru melalui Panca Usaha dan Penyuluhan, sedangkan program BIMAS menyempurnakannya dengan mengkaitkan kredit di dalamnya. Program BIMAS pada awalnya mencakup beberapa wilayah yang kondisi irigasinya bagus dan instansi yang terlibat juga terbatas (Dinas Pertanian Rakyat), dan kemudian program BIMAS diperluas secara nasional dan instansi yang terlibat makin bertambah. Apabila di tingkat pusat ada Badan Pengendali Bimas, maka di tingkat daerah ada Pembina dan Satuan Pelaksana Bimas. Semua unsur ikut berperan aktif (dari Lurah, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri, sampai dengan Presiden) dalam rangka menanggapi permasalahan pangan. Upaya-upaya tersebut pada akhirnya mendatangkan hasil positif, dengan dicapainya swasembada pangan pada tahun 1984. Indonesia menjadi contoh di dunia, dan PBB, Bank Dunia, ADB semua menyatakan kagum atas keberhasilan Indonesia. Indonesia berubah dari importir beras terbesar menjadi negara yang berswasembada. Namun, setelah tercapainya swasembada beras pada tahun 1984, Indonesia mengalami pasang surut dalam produksi dan mencapai puncaknya pada tahun 1998 dengan datangnya El Nino. Produksi beras merosot pada titik terendah, bersamaan dengan jatuhnya pemerintahan Pak Harto.

Petani pada umumnya menghadapi permasalahan dalam hal koordinasi produksi, mulai dari masalah sarana produksi, produksi, produk sampai dengan persoalan pendapatan usahatani. Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan cerminan ketidakberdayaan petani dalam melakukan negosiasi harga, baik harga hasil produksi maupun harga sarana produksinya. Posisi dan kekuatan tawar petani pada umumnya

dalam kondisi lemah, sehingga menjadi kendala dalam rangka meningkatkan pendapatannya. Lemahnya posisi dan kekuatan tawar petani disebabkan kurangnya petani dalam memperoleh akses pasar, informasi pasar dan permodalan usaha (Branson dan Douglas, 1983). Berdasarkan ragam permasalahan yang terdapat pada tingkat petani, maka sudah selayaknya pemerintah atau instansi teknis terkait melakukan penguatan kelembagaan petani.

Menurut Agustian *et al.* (2003), Purwanto *et al.* (2007), dan Nasrul (2012), faktor-faktor yang menyebabkan tidak berjalannya kelembagaan petani di perdesaan adalah sebagai berikut:

1. Kelembagaan petani biasanya dibentuk berdasarkan kepentingan teknis untuk mempermudah pengkoordinasian apabila terdapat program atau kegiatan dari pemerintah, sehingga tidak berorientasi program serta tidak menjamin kemandirian lembaga.
2. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan tidak menggunakan basis *social capital* setempat, dengan prinsip kemandirian lokal yang dibentuk melalui prinsip pemberdayaan.
3. Pembentukan dan pengembangan kelembagaan petani pada umumnya berdasarkan pendekatan *top down*, sehingga partisipasi masyarakat tidak tumbuh secara baik.
4. Kelembagaan yang dibangun terbatas hanya untuk memperkuat ikatan horizontal, dan bukan ikatan vertikal.
5. Partisipasi dan kekompakan anggota kelompok dalam kegiatan kelembagaan masih rendah, dan biasanya tercermin dari rendahnya tingkat kehadiran anggota kelompok dalam pertemuan kelembagaan.
6. Kelembagaan petani sebagai forum kegiatan bersama belum mampu menjadi wadah pemersatu kegiatan anggota dan pengikat kebutuhan anggota secara bersama.
7. Introduksi kelembagaan dari luar kurang memperhatikan struktur dan jaringan kelembagaan lokal yang telah ada, serta kekhasan ekonomi, sosial, dan politik yang berjalan.
8. Pembinaan yang dijalankan pada umumnya cenderung bersifat individual, yaitu hanya kepada pengurus, sehingga tidak terjadi *social learning approach*.
9. Pengembangan kelembagaan selalu meng-

gunakan jalur struktural, dan lemah dari pengembangan aspek kulturalnya. Sikap berorganisasi belum tumbuh pada diri pengurus dan anggotanya.

Selain permasalahan internal petani, ketersediaan faktor pendukung (seperti infrastruktur, lembaga ekonomi perdesaan, intensitas penyuluhan, dan kebijakan pemerintah) sangat diperlukan guna mendorong usahatani dan meningkatkan akses petani terhadap pasar (Saragih, 2001). Kesadaran yang perlu dibangun pada tingkat petani adalah kesadaran berkelompok yang tumbuh atas dasar kebutuhan (bukan paksaan dari pihak lain).

Empat kriteria agar kelembagaan petani kuat dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu: (i) kelembagaan harus tumbuh dari pemikiran petani sendiri; (ii) pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala; (iii) memiliki kekuatan kelembagaan formal; dan (iv) bersifat partisipatif. Manfaat utama terbentuknya kelembagaan petani adalah untuk mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat dan sebagai kontrol sosial, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth dan Darwis, 2003).

Prinsip-prinsip yang harus dipenuhi oleh kelembagaan pertanian agar berdaya guna dan berkelanjutan adalah:

1. Prinsip otonomi, meliputi otonomi individu dan otonomi desa (spesifik lokalita). Pertama: otonomi individu, adalah mengacu pada individu sebagai perwujudan dari hasrat untuk bebas yang melekat pada diri manusia sebagai suatu anugerah paling berharga dari Sang Pencipta (Basri, 2005). Individu-individu yang otonom selanjutnya akan membentuk komunitas yang otonom. Kedua: otonom desa (spesifik lokalita), dimaksudkan bahwa pengembangan kelembagaan petani di perdesaan, disesuaikan dengan potensi desa itu sendiri. Perdesaan pada umumnya mempunyai ragam dan kemajemukan sistem, nilai, dan budaya, juga mempunyai latar belakang sejarah yang panjang dan beragam. Kelembagaan pertanian, termasuk organisasi, perangkat-perangkat aturan dan hukum memerlukan penyesuaian, di samping juga harus memperhatikan elemen-elemen tatanan.
2. Prinsip pemberdayaan, yaitu mengupayakan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas berusaha mengontrol kehidupan

mereka sendiri dan me-ngusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Inti utama pemberdayaan adalah tercapainya kemandirian. Proses pemberdayaan mem-punyai dua prinsip dasar yang harus dipedomani (Saptana, *dkk*, 2003), yaitu: (i) menciptakan ruang atau peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan menurut cara yang dipilihnya sendiri; (ii) mengupayakan agar masyarakat memiliki kemampuan untuk meman-faatkan ruang atau peluang yang tercipta tersebut. Misal: peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap faktor-faktor produksi dan pasar. Pemberdayaan kelembagaan pada masa mendatang perlu diarahkan agar berorientasi pada: (i) pengusahaan komoditas (pangan/non-pangan) yang menguntungkan; (ii) skala usaha ekonomis dan teknologi padat karya; (iii) *win-win mutually* dengan kemitraan yang kolejial; (iv) tercipta interdependensi hulu-hilir; (v) modal berkembang dan kredit melembaga (bank, koperasi, petani); (vi) kooperatif, kompetitif dan transparan melalui sistem informasi bisnis; (vii) memanfaatkan peluang di setiap subsistem agribisnis, serta (viii) dukungan SDM yang berpendidikan, rasional, mandiri, informa-tif, komunikatif, dan partisipatif.

3. Prinsip kemandirian lokal. Pendekatan pembangunan melalui cara pandang kemandirian lokal mengisyaratkan bahwa semua tahapan dalam proses pember-dayaan harus dilakukan secara desentra-lisasi. Upaya pemberdayaan yang berbasis pada pendekatan desentralisasi akan menumbuhkan kondisi otonom, dimana setiap komponen akan tetap eksis dengan berbagai keragaman (*diversity*) yang dikandungnya. Kegagalan pengembangan kelembagaan petani selama ini salah satunya akibat mengabaikan kelembagaan lokal yang hidup di perdesaan, karena dianggap tidak memiliki jiwa ekonomi yang memadai. Ciri kelembagaan pada masyarakat tradisional, adalah dimana aktivitas ekonomi melekat pada kelembagaan kekerabatan dan komunitas. Ciri utama kelembagaan tradisional adalah sedikit kelembagaan, namun banyak fungsi. Beda halnya dengan pada masyarakat modern yang dicirikan oleh munculnya banyak kelembagaan dengan fungsi-fungsi yang spesifik dan sempit-sempit (Saptana *et al.*, 2003).

Kemandirian lokal menunjukkan bahwa pembangunan lebih tepat bila dilihat sebagai proses adaptasi kreatif suatu tatanan masyarakat, dari pada sebagai serangkaian upaya mekanistik yang mengacu pada satu rencana yang disusun secara sistematis. Kemandirian lokal juga menegaskan bahwa organisasi seharusnya dikelola dengan lebih mengedepankan partisipasi, dan dialog.

### **KEARIFAN LOKAL**

Paradigma pembangunan pertanian di era globalisasi yang mengutamakan modernisasi dan prinsip ekonomi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian berakibat pada terjadinya perubahan struktur masyarakat di perdesaan, baik struktur sosial, struktur budaya, dan struktur ekonomi. Dewasa ini, semakin disadari akan pentingnya karakter sumberdaya manusia suatu bangsa. Berbagai kajian menunjukkan, bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang mempunyai karakter kuat. Nilai-nilai yang terdapat pada karakter tersebut adalah nilai-nilai yang digali dari khasanah budaya yang selaras dengan karakteristik masyarakat setempat (kearifan lokal) dan bukan mencontoh nilai-nilai bangsa lain yang belum tentu sesuai dengan karakteristik dan kepribadian setempat. Budaya yang digali dari kearifan lokal bukanlah penghambat kemajuan dalam era globalisasi, namun justru diharapkan dapat menjadi filter dan kekuatan transformasi dalam meraih kejayaan bangsa. Oleh karena itu, menggali nilai-nilai kearifan lokal merupakan upaya strategis dalam membangun karakter bangsa di era global (Wagiran, 2012).

Kearifan lokal sering dikonsepsikan sebagai kebijakan lokal (*local wisdom*), pengetahuan lokal (*local knowledge*), atau kecerdasan lokal (*local genius*). Pemikiran dalam kearifan lokal didasari nalar yang jernih, budi yang baik, dan memuat hal-hal yang positif. Penguasaan atas kearifan lokal akan mengusung jiwa yang akan semakin mempunyai budi luhur. Definisi kearifan lokal tersebut, paling tidak menyiratkan beberapa konsep, yaitu: (i) kearifan lokal adalah sebuah pengalaman panjang, yang diendapkan sebagai petunjuk perilaku seseorang; (ii) kearifan lokal tidak terlepas dari lingkungan pemiliknya; (iii) kearifan lokal bersifat dinamis, fleksibel, terbuka, dan senantiasa menyesuaikan dengan jamannya. Kearifan lokal selalu terkait dengan kehidupan manusia dan lingkungannya. Kearifan lokal muncul sebagai penjaga atau filter iklim global yang melanda kehidupan manusia.

Kearifan lokal mempunyai korelasi yang positif terhadap kelembagaan pertanian dalam mendukung agribisnis pangan. Eksistensi kelembagaan pertanian yang senantiasa memperhatikan kearifan lokal, baik dalam aktifitas sosial, ekonomi, maupun teknis, maka akan semakin mempunyai kontribusi yang nyata terhadap pengembangan agribisnis pangan. Menurut Priyanto (2007), lestarnya ternak di daerah Sumba, karena keberadaan ternak tersebut dimanfaatkan dalam peristiwa budaya dan tradisi. Peran ternak di Sumba sangat penting kaitannya dengan adat istiadat sebagai "belis" (emas kawin). Pola pengembangan ternak menjadi terbuka luas dengan adanya kearifan lokal, adat budaya, dan tradisi. Pembinaan kelompok tani yang difokuskan dalam pengaktifan peran dan fungsinya, yang diarahkan pada kegiatan "gotong royong" juga merupakan bentuk pemanfaatan kearifan lokal.

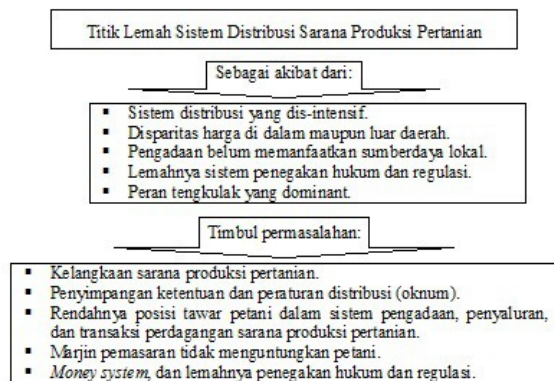
### **PENERAPAN SISTEM AGRIBISNIS**

Terciptanya lingkungan usahatani secara kondusif dengan tetap berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan dan pendapatan petani serta pertumbuhan ekonomi daerah, diperlukan penerapan sistem pengembangan pertanian yang berorientasi pada pendekatan sistem agribisnis. Menurut Suryana (2003), pengembangan sistem agribisnis sangat besar peranannya dalam menunjang terwujudnya ketahanan pangan yang kokoh. Hasil penelitian Ekowati *et al.* (2011), bahwa penerapan sistem agribisnis pada usaha ternak sapi potong rakyat pola induk anak (*cow-calf operation*) berpengaruh nyata terhadap pendapatan peternaknya. Sistem pengembangan agribisnis pangan harus senantiasa memperhatikan karakteristik usaha pada tingkat petani yang bersangkutan (termasuk di dalamnya adalah kearifan lokal).

#### **1. Subsistem Agribisnis Hulu**

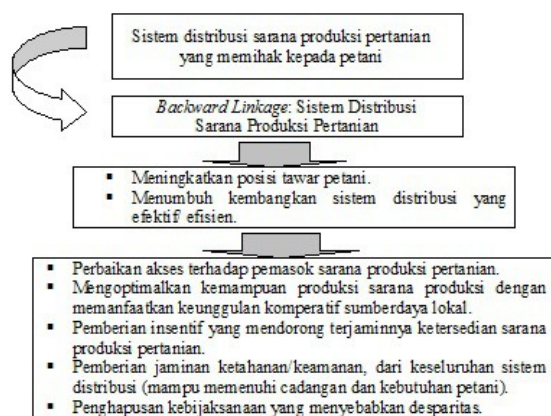
Ketersediaan saprotan, ditinjau dari kuantitas maupun kualitas harus sesuai dengan yang diinginkan petani. Sistem pengadaan dan distribusi saprotan pada tingkat petani, mungkin masih dapat dikategorikan tradisional. Hasil penelitian Prasetyo *et al.* (2011), bahwa penerapan subsistem praproduksi pada usaha penggemukan sapi potong rakyat di Jateng dalam kategori kurang baik. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan karena struktur pasar bagi saprodi (benih, pupuk, obat-obatan, pakan, dan lain-lain) adalah merupakan struktur oligopoli (*oligopoly market structure*). Struktur pasar

oligopoli mengindikasikan, bahwa petani sebagai konsumen saprotan cenderung bertindak sebagai penerima harga (*price taker*), sedangkan penyedia saprodi (pada umumnya pabrikan) cenderung bertindak sebagai pembuat harga (*price maker*) (Prasetyo *et al.*, 2006).



Ilustrasi 1. Titik Lemah Sistem Distribusi Sarana Produksi Pertanian

Pada sisi lain, saprodi untuk sampai ke petani masih melalui rantai pemasaran yang panjang dan tidak efektif. Tingkat harga saprodi yang terjadi pada tingkat petani sering kali bervariasi, yang mempunyai kecenderungan bahwa harga/satuan lebih tinggi bila dibandingkan dengan harga pada tingkat perusahaan.



Ilustrasi 2. Sistem Distribusi Sarana Produksi yang memihak Petani.

Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, adalah meningkatkan peranan dan tugas dari organisasi kelembagaan petani (misal: kelompok tani, gapoktan, koperasi), serta peranan pemerintah daerah (instansi teknis terkait) dalam hal peraturan atau regulasi sistem pengadaan sarana produksi pertanian, serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman petani pelaku usahatani melalui *on job training*. Pada sisi lain, pemerintah hendaknya perlu memfasilitasi

terobosan riset dan inovasi teknologi, khususnya untuk menciptakan agar pengadaan bahan baku sarana produksi pertanian tidak tergantung dari luar. Pada masa mendatang, sebagai tantangan dalam membangun daya saing sistem agribisnis adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya yang berbasis pada sumberdaya lokal.

## 2. Subsistem Usahatani

Produktivitas dan kualitas sarana produksi pertanian agar tersedia secara kontinyu dan berkesinambungan, diperlukan pembinaan teknis dari instansi teknis terkait maupun pihak lain yang peduli, di samping masyarakat tani sendiri harus mampu memposisikan dirinya sebagai subyek pelaku usahatani. Bentuk-bentuk pembinaan teknis antara lain tentang penerapan sapa usahatani secara baik dan benar, sehingga dapat meningkatkan keseriusan petani dalam melaksanakan usahatannya secara intensif. Pembinaan yang tidak kalah penting adalah di bidang penerapan pembukuan usahatani, paling tidak diawali dari pembukuan secara sederhana. Pembukuan usahatani eksistensi-nya bermanfaat sebagai alat pengendalian dan evaluasi terhadap kegiatan dan keberhasilan usahatani.

Pada sisi lain pembinaan pemahaman terhadap petani tentang penetapan komoditas unggulan juga perlu dilakukan secara intensif dan berkesinambungan. Kondisi ini di dasarkan pada realitas di lapang, bahwa pada umumnya ragam usaha pertanian sangat heterogen, sehingga tingkat efisiensi usahatani kurang dapat dihasilkan secara baik. Pengembangan komoditas unggulan yang berorientasi pada sumberdaya lokal dan pasar, diharapkan dapat meningkatkan efisiensi usahatani dan pada gilirannya tingkat keuntungannya menjadi lebih baik.



Ilustrasi 3. Pendekatan Penetapan Komoditas Unggulan

## 3. Subsistem Agribisnis Hilir

Produktivitas hasil usahatani persatuan skala usaha pada antar petani dapat bervariasi,

demikian pula dalam hal kualitas produk yang dihasilkan. Dari kondisi tersebut pada gilirannya juga menciptakan tingkat keuntungan usaha yang juga berbeda.

Produk hasil usahatani idealnya di pasarkan dengan tetap memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memanfaatkan rantai pemasaran yang pendek, karena semakin pendek rantai pemasaran maka ada kemungkinan semakin menguntungkan bagi petani produsen dan konsumen.
2. Memanfaatkan penanganan produk yang mungkin dapat dilakukan, agar dapat menciptakan daya tarik bagi pembeli.
3. Memanfaatkan organisasi kelembagaan petani (kelompok tani, gapoktan) atau koperasi, agar kontinuitas dan sustainabilitasnya dapat lebih terjamin.

Di samping itu, sudah saatnya mengaktifkan lembaga *research and development (R & D)* di bidang pemasaran. Hal ini di dasarkan oleh keragaman sosial budaya yang tentunya juga menampilkan keragaman dalam preferensi konsumen terhadap produk usahatani. Keragaman preferensi konsumen di pasar lokal maupun pasar regional perlu digali untuk dijadikan suatu nilai produk melalui kegiatan *research and development*. Di samping juga diperlukan adanya kegiatan R & D untuk memodernisasi budaya berbasis lokal/etnis.

#### **4. Subsistem Jasa Penunjang Agribisnis**

Subsistem jasa penunjang agribisnis keberadaannya sangat diperlukan bagi pengembangan usahatani pangan, misalnya pengembangan lembaga keuangan, pengembangan institusi sumberdaya manusia, pengembangan organisasi ekonomi petani, pengembangan fungsi penelitian dan lain-lain. Hal ini karena keberadaan lembaga-lembaga tersebut untuk melaksanakan fungsinya bagi kepentingan petani belum terlaksana secara optimal. Menurut Prasetyo *et al.* (2011), ketersediaan jasa penunjang agribisnis, khususnya lembaga keuangan dan lembaga pengembangan sumberdaya manusia belum dimanfaatkan secara baik.

##### **4.1. Pengembangan lembaga keuangan**

Kebutuhan modal dalam sistem agribisnis pangan akan selalu berlangsung dan sesuai dengan perkembangan skala usahanya. Bagi

petani kecil, permodalan merupakan permasalahan yang serius. Kebijakanaan penyediaan modal usaha yang selama ini seringkali dilaksanakan dan bersifat langsung (berupa bantuan modal), dalam jangka panjang dapat berakibat terjadinya ketergantungan para petani kepada pemerintah. Petani pada era sekarang hendaknya jangan dipandang sebagai obyek, tetapi harus diperankan sebagai subyek pembangunan yang diberikan keleluasaan untuk kemandiriannya. Fokus kebijakanaan hendaknya ditujukan untuk pengembangan lembaga keuangan yang dapat digunakan sebagai sumber permodalan bagi petani rakyat. Pada prinsipnya lembaga keuangan yang dapat berperan terhadap pemenuhan permodalan bagi petani, adalah lembaga keuangan formal (bank pemerintah dan swasta), lembaga keuangan non-formal (rentenir, bakul, tengkulak, bank keliling), dan lembaga non keuangan (BUMN, laba yang disimpan).

Perbankan sebagai lembaga keuangan perlu mengembangkan skim-skim kredit dengan jenis, jumlah, dan persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan dan tahapan usaha yang dilakukan petani. Penyediaan kredit bagi petani hendaknya diupayakan dengan prosedur sederhana, suku bunga kondusif, dengan agunan yang memungkinkan dipenuhi oleh petani kecil, serta tetap di dasarkan pada kelayakan usaha bagi petani sebagai calon debiturnya. Skim kredit di peternakan yang saat ini cukup memasyarakat adalah KUPS (kredit usaha perbibitan sapi), KKP-E (kredit ketahanan pangan dan energi), KUR (kredit usaha rakyat).

##### **4.2. Pengembangan sumberdaya manusia agribisnis**

Pengembangan SDM agribisnis merupakan hal penting dan perlu diperhatikan dalam pembangunan sistem agribisnis. Hal ini karena dalam pembangunan sistem agribisnis, SDM tidak hanya sekedar faktor produksi melainkan yang lebih penting lagi adalah sebagai pelaku langsung dari pembangunan sistem agribisnis tersebut. Untuk itu diperlukan tiga sasaran dan penting bagi pengembangan SDM agribisnis, yaitu: (i) mengembangkan kemampuan penguasaan teknologi dan pengetahuan di bidang agribisnis pangan; (ii) mengembangkan kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurship*) sehingga petani mampu menjadi pelaku-pelaku ekonomi yang handal dan tangguh; (iii) mengembangkan kemampuan *team work*. SDM agribisnis yang dimaksud dalam hal ini,

mencakup SDM agribisnis pelaku langsung (baik pada agribisnis hulu, *on-farm*, agribisnis hilir) serta SDM agribisnis sebagai pendukung (SDM birokrat, SDM perbankan, serta SDM penyedia jasa agribisnis).

Karakteristik khusus agribisnis, antara lain: tingkat ketergantungan antar subsektor, antar unit-unit kegiatan dalam satu subsektor maupun usaha, produk yang merupakan produk biologis. Berdasarkan karakteristik tersebut diperlukan suatu *team work* SDM agribisnis yang harmonis dan di dasarkan pada pertimbangan, yaitu: (i) pelaku ekonomi pada subsektor agribisnis hulu yang cenderung bertindak demi kepentingan sendiri dan tidak melihat konsekuensi perilaku pada sub-sektor *on-farm agribusiness* dan sub-sektor hilir, dan lagi sering menimbulkan konflik ekonomi dalam sektor agribisnis itu sendiri; (ii) pelaku ekonomi pada subsektor agribisnis hilir yang juga bertindak demi kepentingan sendiri dan tidak melihat konsekuensi tindakannya yang berdampak pada subsektor yang lain. Kondisi ini semakin diperburuk dengan adanya kebijaksanaan atau layanan penyedia jasa (pemerintah, perbankan, swasta, dan lain-lain) yang tidak integratif, sehingga berakibat munculnya optimisme pada sektor tertentu dan pesimisme pada sektor yang lain. Untuk itulah *team work* SDM agribisnis diperlukan keberadaannya, sehingga sinyalemen-sinyalemen negatif tersebut tidak terjadi.

Untuk membangun suatu *team work* SDM agribisnis yang harmonis, maka setiap SDM agribisnis harus memiliki wawasan *cross-job*, wawasan yang luas tentang posisinya dalam usahatani/agribisnis atau lembaga/institusi, wawasan psikologi dan dinamika pasar, wawasan posisi sektor agribisnis dalam perekonomian, wawasan tentang ekonomi global, dan lain-lain. Untuk meningkatkan kemampuan SDM agribisnis yang demikian, diperlukan suatu *on-job cross training*, selain *on the job training* yang telah berlangsung selama ini.

#### **4.3. Pengembangan organisasi ekonomi petani**

Pembangunan sistem agribisnis oleh rakyat dan untuk rakyat memerlukan pengembangan kelembagaan dan organisasi ekonomi. Organisasi ekonomi seperti koperasi agribisnis perlu ditumbuh kembangkan sebagai organisasi ekonomi petani. Koperasi agribisnis yang perlu dikembangkan, koperasi dari kelompok tani yang tumbuh berdasarkan kesamaan aktifitas dan kepentingan ekonomi.

Peranan koperasi untuk pemberdayaan petani juga dipandang sebagai upaya yang realistis dan mempunyai peranan positif. Esensi dari pemberdayaan ekonomi petani, adalah bagaimana cara petani untuk merebut nilai tambah yang ada pada agribisnis hilir, sekaligus mampu memperkuat usahanya. Hal ini mengingat bahwa petani pada umumnya relatif kecil dan lemah dalam berbagai aspek, maka secara individu tidak akan mampu merebut nilai tambah tersebut.

#### **4.4. Pengembangan fungsi penelitian dan pengembangan agribisnis**

Bergesernya peranan pemerintah dalam proses pembangunan di masa yang akan datang, maka fungsi pemerintah dalam menghasilkan teknologi dan berbagai model kelembagaan sistem agribisnis, akan semakin strategis dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis pangan. Pada saat ini memang fungsi penelitian masih didominasi oleh lembaga-lembaga penelitian pemerintah, namun di masa mendatang dengan terbatasnya sumberdaya penelitian pemerintah, keterlibatan penelitian oleh pihak-pihak swasta, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan organisasi petani sangatlah dibutuhkan. Kebijakan pemerintah daerah maupun pusat yang dapat merangsang keterlibatan pihak-pihak non pemerintah dalam melakukan penelitian dan pengembangan yang menunjang pembangunan sistem agribisnis pangan sangatlah diperlukan.

### **KESIMPULAN**

Ketahanan pangan merupakan salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan nasional, di samping pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Ketahanan pangan yang tangguh, maka suatu negara tidak akan mudah goyah apabila terjadi penurunan produksi pangan maupun gejolak ekonomi.

Pelaku utama pengembangan sistem ketahanan pangan adalah petani sebagai produsen, pengolah, dan pedagang yang sebagaimana besar adalah pengusaha kecil. Pemberdayaan pengusaha kecil sangatlah diperlukan, agar mereka dapat mandiri dan mampu mengembangkan agribisnis pangan secara berkelanjutan.

Kelembagaan pertanian dan sistem agribisnis mempunyai peranan yang besar dalam menunjang terwujudnya ketahanan pangan. Kesadaran yang perlu dibangun pada tingkat



petani adalah kesadaran berkelompok yang tumbuh atas dasar kebutuhan (bukan paksaan dari pihak lain). Kelembagaan pertanian dalam pengembangannya perlu diarahkan menjadi kelembagaan ekonomi dengan tujuan meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha, serta meningkatkan posisi dan kekuatan tawar petani. Melalui pembinaan kelembagaan ekonomi, petani sebagai pelaku utama akan diorganisir dan ditingkatkan kemampuannya melalui pengembangan kapasitas manajerial, kepemimpinan, dan kewirausahaan (*entrepreneur*).

Empat kriteria agar kelembagaan petani kuat dan mampu berperan aktif dalam memperjuangkan hak-haknya, yaitu: (i) kelembagaan harus tumbuh dari pemikiran petani sendiri; (ii) pengurusnya berasal dari para petani dan dipilih secara berkala; (iii) memiliki kekuatan kelembagaan formal; dan (iv) bersifat partisipatif. Kelembagaan ekonomi petani idealnya memenuhi prinsip spesifik lokal, prinsip pemberdayaan, dan prinsip kemandirian.

Kearifan lokal mempunyai korelasi yang positif terhadap kelembagaan pertanian dalam mendukung agribisnis pangan. Kearifan lokal bukanlah penghambat kemajuan, namun justru diharapkan dapat menjadi filter dan kekuatan transformasi dalam meraih kejayaan bangsa. Nilai-nilai kearifan lokal mempunyai arti penting dalam membangun karakter bangsa di era global. Kelembagaan pertanian yang senantiasa memperhatikan kearifan lokal, baik dalam aktifitas sosial, ekonomi, maupun teknis, maka akan semakin mempunyai kontribusi yang nyata terhadap pengembangan agribisnis pangan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agustian, A., F. Supena., Syahyuti, dan E. Ariningsih. 2003. Studi Baseline Program PHT Perkebunan Rakyat Lada di Bangka Belitung dan Lampung. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.

Basri, F.H. 2005. Tantangan dan Peluang Otonomi Daerah. UB, Malang.

Branson, R.E., dan G.N. Douglas. 1983. Introduction to Agricultural Marketing. Mc Graw Hill Book Company, New York, USA.

Ekowati, T., D. H. Darwanto, S. Nurtini, and A. Suryantini. 2011. The analysis of beef cattle subsystem agribusiness im-

plementation in Central Java Province, Indonesia. *J. Indonesian Trop. Anim. Agric.* 36 (4): 281 – 289.

- Elizabeth, R., dan V. Darwis. 2003. Karakteristik Petani Miskin dan Persepsinya terhadap Program JPS di Jawa Timur. SOCA, Bali.
- Elizabeth, R. 2007. Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Bogor.
- Nasrul, W. 2012. Pengembangan kelembagaan pertanian untuk meningkatkan kapasitas petani terhadap pembangunan pertanian. *J. Menara Ilmu* 3(29): 166-174.
- Prabowo, D. 2000. Kelembagaan dan koordinasi produksi pertanian TPH dalam membangun ketahanan pangan dan agribisnis. Pertanian dan Pangan Bunga Rampai Pemikiran Menuju Ketahanan Pangan. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Prasetyo, E., S. Dwijatmiko, W. Sumekar, T. Ekowati, dan Mukson. 2006. Model Manajemen Permodalan dan Manajemen Agribisnis sebagai Upaya Pengembangan Peternakan Rakyat di Jawa Tengah. Fakultas Peternakan, Undip, Semarang.
- Prasetyo, E., Sunarso, P.B. Santosa, E. Rianto. 2012. The Influence of Agribusiness Subsystem on Beef Cattle Fattening Farm's Profit in Central Java. *J. Indonesian Trop. Anim. Agric.* 37(2): 121-126.
- Priyanto, D. 2007. Prima Tani Sumba Timur mendukung Ketahanan Pangan Daerah. Sinar Tani, 5 Desember 2007. Puslitbang Peternakan, Bogor.
- Purwanto, M. Syakur, dan P. Santopso. 2007. Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani dalam Mendukung Pembangunan Pertanian di Jawa Timur. BPTP Jawa Timur, Malang.
- Saptana, T., Pranaji, Syahyuti, dan E.M. Roosganda. 2003. Transformasi Kelembagaan untuk Mendukung Ekonomi Kerakyatan di Perdesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Saragih, B. 2001. Pembangunan sektor agribisnis dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Kumpulan Pemikiran Agribisnis, Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi berbasis Pertanian. PT. Loji Grafika Griya Sarana, Bogor.

- Saragih, B. 2010. Suara Agribisnis. PT. Permata Wacana Lestari, Jakarta.
- Suryana, A. 2003. Kebijakan ketahanan pangan. Kapita Selekta Evolusi Pe-mikiran Kebijakan Ketahanan Pangan. BPFE, Yogyakarta.
- Syahyuti. 2003. Bedah Konsep Kelembagaan: Strategi Pengembangan dan Penerapannya dalam Penelitian Pertanian. Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian, Bogor.
- Wagiran. 2012. Pengembangan karakter berbasis kearifan lokal Hamemayu Hayuning Bawana. J. Pendidikan Karakter. 2(3): 329-339.